



Tinjauan Peraturan Ma'had Al-Zaytun dalam Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan *Siyasah Dusturiyah*

Supriyono¹, Abdur Rahim², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: suprionoyts@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-02-07 Revised: 2025-03-23 Published: 2025-04-05 Keywords: <i>Local Content;</i> <i>Siyasah Dusturiyah;</i> <i>Regional Regulation.</i>	This study aims to examine the <i>Regulation Review of Ma'had Al-Zaytun in the Development of Local Content Education from the Perspective of Regional Regulation No. 8 of 2015 and Siyasah Dusturiyah</i> . The author employs a library research method with a juridical-normative legal research approach. The primary data sources used include Regional Regulation No. 8 of 2015 on education in Indramayu, the book <i>Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia</i> by Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H.C., and the book <i>Al-Zaytun: Sumber Inspirasi</i> . Secondary sources include books, journals, documents, legislation, and other relevant materials. The research findings indicate that the review of Ma'had Al-Zaytun's regulations on the development of local content education, viewed from the perspective of Regional Regulation No. 8 of 2015 and <i>Siyasah Dusturiyah</i> , reveals the following: 1) At Ma'had Al-Zaytun, local content is developed through the integration of arts, regional languages, and skills based on local needs, such as organic farming and environmental management. 2) This approach aligns with the teachings of <i>Siyasah Dusturiyah</i> . A concrete example of this approach is the integration of education based on environmental conservation and natural resource management, which is not only locally relevant but also reflects global responsibility.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2025-02-07 Direvisi: 2025-03-23 Dipublikasi: 2025-04-05 Kata kunci: <i>Muatan Lokal;</i> <i>Siyasah Dusturiyah;</i> <i>Perda.</i>	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Peraturan Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan <i>Siyasah Dusturiyah</i> . Penulis menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang pendidikan di Indramayu, buku yang berjudul <i>Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refreksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia</i> karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H.C dan Buku <i>Al-Zaytun Sumber Inspirasi</i> dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan Peraturan Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan <i>Siyasah Dusturiyah</i> . 1) Di Ma'had Al-Zaytun, muatan lokal dikembangkan melalui integrasi seni, bahasa daerah, dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal seperti pertanian organik dan pengelolaan lingkungan. 2) sesuai dengan ajaran <i>Siyasah Dusturiyah</i> . Contoh konkret dari pendekatan ini adalah integrasi pendidikan berbasis pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, yang tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga mencerminkan tanggung jawab global.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama dan berdasarkan moral estetika, etis dan dinamis sangat bergantung pada pendidikan dan juga hukum. Namun pendidikan jika tidak di dukung oleh hukum yang mengatur sepertinya pendidikanpun akan barangsir sirna dan sulit untuk di kembangkan. Ini pentingnya untuk menulis hubungan antara keduanya (Supriyanta, 2021). Selanjutnya menurut Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang Pendidikann di Indramayu,

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah memberikan keleluasaan dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk mengembangkan pendidikan muatan lokal

sehingga setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan satu buku panduan yang digunakan oleh sekolah tersebut berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan untuk mewadahi gagasan pengembangan pendidikan berbasis kearifan dan budaya lokal Kurikulum yang mewadahi diversifikasi sosio-kultur memberikan peserta didik mengetahui pembelajaran budaya lokal dan mendapatkan pengalaman belajar yang utuh dan akuisisi budaya lokal ke dalam kurikulum memungkinkan kompetensi sosial terinternalisasi secara optimal oleh peserta didik dan memberinya bekal kecakapan hidup untuk kelak mampu menjadi individu sekaligus warga masyarakat (Wibowo, 2021).

Menurut Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Indramayu, Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, keurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Kurikulum Nasional. Selanjutnya, lampiran dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Indramayu pasal 13 ayat (2) menegaskan satuan pendidikan berkewajiban mewujudkan visi dan misi pendidikan, mewujudkan suasana keberagaman di lingkungan satuan pendidikan, menjamin hak-hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dan penghasilan/strata sosial ekonomi orang tua/wali siswa, melaksanakan evaluasi diri sekolah secara berkelanjutan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan lampiran dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Indramayu pasal 13 ayat (2) tersebut diperlukan adanya peraturan pada kurikulum satuan pendidikan, di mana dengan adanya peraturan tersebut dapat mewujudkan pengembangan pendidikan muatan lokal di satuan pendidikan.

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk mematuhi, mentaati peraturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal. Keberhasilan suatu penerapan peraturan pondok pesantren sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Hafi, 1983). Sama halnya dengan pondok pesantren Al-Zaytun yang mengadakan sebuah peraturan dan menekankan agar seluruh santri mengikuti dan menaati peraturan yang tersedia, dengan terlaksananya sebuah peraturan, maka akan terwujud perkembangan pendidikan muatan lokal. Ma'had Al-Zaytun adalah sebuah pesantren yang terletak

di bagian barat Kabupaten Indramayu. Pemilihan pesantren sebagai salah satu usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Sistem pendidikan Ma'had Al-Zaytun menganut sistem pendidikan satu pipa (*One Pipe Education System*), yaitu sistem pendidikan yang berkelanjutan dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi. Ma'had Al-Zaytun mempunyai arah dan tujuan pendidikan yang jelas, yaitu: mempersiapkan peserta didik untuk berakidah kokoh terhadap Allah dan syariat-Nya, menyatu di dalam tauhid, *berakhlaqul karimah*, berilmu pengetahuan yang luas, dan berketerampilan yang tinggi yang kesemuanya itu terkandung dalam kata *basthotan fil 'ilmi wal jismi* (Tabroni, 2018).

Kurikulum Al-Zaytun juga menganut *falsafah flexible* dan *integrated curriculum* (kurikulum yang fleksibel dan terintegrasi). Terintegarsi bermakna mengadopsi keseluruhan kurikulum pendidikan nasional (Diknas) dan kurikulum Departemen Agama dan ditambah dengan kurikulum muatan lokal, seperti: *tahfidz* Qur'an, pendalaman bahasa, pembahasan Kitab Kuning, jurnalistik, pengembangan budaya perdamaian, dan toleransi serta metode didaktik yang mengajarkan siswa untuk dapat mengajar nantinya. Ketiga kurikulum yang terintegrasi tersebut diterapkan secara bertahap disesuaikan waktu dan visi misi yang telah dicanangkan semenjak awal. Kurikulum fleksibel bermakna bahwa kurikulum yang diterapkan selalu menerima koreksi dan perubahan-perubahan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Evaluasi dilakukan oleh Badan Litbang Al-Zaytun setahun sekali melalui sidang. Salah satu contoh keputusan yang dihasilkan sidang Litbang adalah adanya kursus komputer yang diselenggarakan Al-Zaytun *Global Information and Communication Technology* (AGICT) dan Program Tabungan Bahasa, *Tahfidz* Quran, Perilaku disiplin di Masjid, dan *rihlah* ilmiah ke lembaga-lembaga negara. Kesemuanya adalah hasil Litbang pada tanggal 13 Juni 2003. Sidang Litbang merupakan usaha Ma'had Al-Zaytun untuk selalu melakukan pembaharuan sistem manajemen mereka. Sidang ini dilakukan setiap tahun sekali yang diberi nama sidang Litbang Ma'had Al-Zaytun. Sidang ini diikuti perwakilan setiap unit yang ada di Ma'had Al-Zaytun. Segala persoalan seperti kelemahan pelaksanaan program di setiap unit penunjang pendidikan dievaluasi pada sidang ini. Dalam pelaksanaannya sidang dipimpin oleh Syekh Ma'had AS Panji Gumilang (Tabroni, 2018).

Untuk menyukseskan Sistem Pendidikan Satu Pipa tersebut, Ma'had Al-Zaytun kemudian menerapkan pembelajaran yang bukan hanya secara *every day tetapi secara every hour. Every hour* diartikan sebagai budaya berlomba-lomba dalam kebaikan sepanjang waktu. Budaya Islam terlihat di Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan nilai-nilai dan etika islami yang dibalut budaya modern. Hal ini salah satunya mewujudkan dalam etika sosial di lingkungan Ma'had Al-Zaytun, seperti pemakaian simbol-simbol Islam; ucapan salam kala bertemu, dan panggilan *abi, ummi, akhi dan ukhti*. Dalam rangka semangat penerapan hidup islami nama-nama santri kemudian diganti atau dilengkapi dengan nama yang dianggap lebih islami, seperti; Abu Salam, Abu Jihad, atau Syekh Ma'had Al-Zaytun (Baedowi, 2011).

Selain itu, sesuai teknis sistem pendidikan nasional siswa setingkat SLTA di Ma'had Al-Zaytun juga dilakukan penjurusan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Penjurusan tersebut dilakukan secara khusus oleh tim penyeleksi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah; nilai akademis, minat, hasil penelitian tim seleksi tentang nilai akademis dan minat santri serta hasil penelitian tim yang dikonsultasikan kepada orang tua santri. Termasuk di dalamnya hasil tes IQ yang diujikan kepada santri oleh tim psikolog Al-Zaytun. Penjurusan dimulai secara bertahap dari kelas 10 dan 11 atau setara dengan kelas 1 di tingkat SMU atau Madrasah Aliyah. Penjurusan tersebut disesuaikan dengan perkembangan kurikulum nasional (Baedowi, 2011).

Untuk dapat mewujudkan perkembangan pendidikan muatan lokal di lingkungan pesanteren, tidak hanya disandarkan pada peraturan pemerintah, melainkan mengaitkan pula dengan aturan Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik (*Siyasah*). Karena Islam telah mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun memiliki batasan-batasan syariatnya, sehingga kemudian melahirkan istilah *Siyasah Syar'iyah* atau politik syariat. Secara sederhana *Siyasah Syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Tidak hanya *Siyasah Syar'iyah*, *Siyasah dusturiyah* ikut dikaitkan dalam hal ini (Simanullang, 2015).

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-

undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Iqbal, 2014).

Siyasah dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Djazuli, 2005).

Hukum Islam dianggap sebagai *jurist law* karena secara teori dan fakta sejarah, hukum tersebut dikembangkan dan dijaga oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) yang independen dari institusi negara. Pada proses selanjutnya, agar mempunyai kekuatan hukum memaksa (menurut teori hukum modern), *fiqh* yang disusun oleh para *fuqaha'* diundangkan oleh pihak pemerintah (Djazuli, 2005).

Merujuk kepada penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Peraturan Ma'had Al-Zaytun Terhadap Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan *Siyasah Dusturiyah*".

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang pendidikan di Indramayu, buku yang berjudul Ilmu Hukum Dalam Simpul *Siasyah Dusturiyah*: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H.C dan Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi. Data sekunder bersumber dari berbagai referensi yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan penelitian, undang-undang, peraturan, dan sumber lain yang telah terverifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Peraturan Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 24 November 2015. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 menjadi landasan untuk dipergunakan oleh masyarakat Indramayu mengenai penyelenggara pendidikan (Perda, 2015). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu terdiri dari 69 pasal, 20 bab yaitu ketentuan umum, dasar, fungsi, dan tujuan, penyelenggaraan dan jenjang pendidikan, hak dan kewajiban orang tua, masyarakat, satuan pendidikan, dan pemerintahan daerah, peserta didik, penyelenggaraan satuan pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, pendidik dan tenaga kependidikan, dana pendidikan dan pembiayaan pendidikan, pendidikan keagamaan dan kesiswaan, dewan pendidikan dan komite sekolah, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, kerjasama, buku teks pelajaran, pelayanan mutu pendidikan, data dan informasi, sanksi administrasi dan ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup (Perda, 2015).

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu dibuat dengan beberapa point pertimbangan, yaitu: dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu, diperlukan adanya regulasi di bidang pendidikan yang memadai guna mewujudkan sistem pendidikan di daerah yang handal dan berkualitas, salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka Indeks Pendidikan yang ditentukan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH), dan seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat dan perubahan peraturan perundangundangan dibidang pendidikan, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan, untuk itu perlu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Perda, 2015).

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 mengatur tentang pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai

bagian dari upaya melestarikan budaya dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam proses pendidikan formal maupun nonformal. Dalam konteks ini, Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai universal dan lokalitas, memiliki kebijakan strategis untuk menerapkan pendidikan muatan lokal yang sejalan dengan visi Perda tersebut. Implementasi ini mencakup pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran, serta pelibatan masyarakat lokal dalam mendukung program pendidikan (Rahmatulloh et al., 2021).

Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren modern, Ma'had Al-Zaytun menempatkan pendidikan muatan lokal sebagai salah satu prioritas utama dalam kurikulumnya. Pendekatan holistik yang diterapkan tidak hanya mengintegrasikan aspek akademik, tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan karakter yang mengakar pada budaya lokal. Dengan demikian, siswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan umum, tetapi juga nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian mereka dalam konteks budaya, agama, dan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, yang menegaskan pentingnya penguatan karakter dan kesadaran budaya melalui pendidikan yang berbasis kearifan lokal (Setiawan, 2023).

Peraturan Ma'had Al-Zaytun memberikan penekanan pada pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai warisan budaya lokal sebagai bagian dari identitas mereka. Program-program yang dirancang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mencakup praktik langsung, seperti pengajaran seni tradisional, budaya lokal, dan keterampilan berbasis lingkungan. Siswa diharapkan untuk menguasai keterampilan ini, yang nantinya akan berguna baik untuk pelestarian budaya maupun untuk pengembangan potensi diri mereka dalam konteks sosial. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berusaha membangun generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik yang baik, tetapi juga memiliki kedalaman karakter yang terasah dari nilai-nilai budaya lokal (Hariadi, 2018).

Peraturan di Ma'had Al-Zaytun mengadopsi prinsip pengelolaan pendidikan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam

setiap aspek pengajaran. Kolaborasi ini tidak hanya sebatas pada pemberian materi dari tenaga pengajar, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, seniman lokal, dan petani sebagai narasumber atau mentor bagi siswa. Melalui pendekatan ini, siswa diberi kesempatan untuk belajar langsung dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan kearifan lokal yang ada di lingkungan mereka

Pendekatan inklusif ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, yang mendorong adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dalam pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal. Perda tersebut menekankan bahwa untuk menciptakan pendidikan yang berkelanjutan dan relevan, penting bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya memperkaya kurikulumnya, tetapi juga membangun hubungan yang erat antara sekolah dan komunitas. Hal ini memastikan bahwa pendidikan yang diberikan lebih menyentuh kehidupan nyata siswa, memperkenalkan mereka pada berbagai aspek budaya, sosial, dan ekonomi yang ada di sekitar mereka (Saputra & Siregar, 2023).

Selain itu, peran masyarakat lokal dalam pendidikan di Ma'had Al-Zaytun juga memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya dan tradisi lokal. Dengan menghadirkan para seniman dan petani sebagai mentor, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka belajar tentang teknik bertani organik dari petani lokal atau mengenal seni tradisional melalui bimbingan dari seniman setempat. Pendekatan ini memperkuat identitas budaya siswa sekaligus membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk berkembang di dunia yang semakin global. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mencetak individu yang berpengetahuan luas, tetapi juga yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap budaya dan masyarakat mereka (Felecia, F., & Halim, 2024).

Selain itu, Ma'had Al-Zaytun mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan seni, olahraga tradisional, dan diskusi tematik tentang kearifan lokal. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memperkenalkan budaya lokal kepada siswa tetapi juga untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan demikian, implementasi ini berkontribusi pada pelestarian budaya sekaligus membangun karakter siswa (Mohd, R. M., & Basri, 2018).

Dalam perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, pendidikan muatan lokal tidak hanya terbatas pada pelestarian budaya dan pengembangan keterampilan, tetapi juga mencakup penguatan kesadaran lingkungan. Salah satu fokus utama dari Perda tersebut adalah pentingnya mendidik generasi muda untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal. Ma'had Al-Zaytun mengimplementasikan berbagai program yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari kurikulumnya. Program-program ini dirancang untuk memberi siswa pemahaman yang lebih dalam mengenai peran mereka dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar (Acim, S. A., & Sumardi, 2023).

Selain pengelolaan limbah dan konservasi air, Ma'had Al-Zaytun juga mengembangkan program pertanian organik yang melibatkan siswa dalam proses bercocok tanam menggunakan teknik ramah lingkungan. Dalam program ini, siswa tidak hanya diajarkan tentang cara bertani secara organik, tetapi juga mengenai pentingnya menjaga kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya. Program ini merupakan bagian dari upaya Ma'had Al-Zaytun untuk mendidik siswa agar dapat menghasilkan produk pertanian yang sehat, sekaligus menjaga kelestarian alam. Melalui pengalaman langsung di lapangan, siswa menjadi lebih peka terhadap tantangan lingkungan dan belajar bagaimana berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam (Fenton, 2024).

Pendidikan yang mengedepankan kesadaran lingkungan ini sejalan dengan tujuan Perda Nomor 8 Tahun 2015 yang menekankan pentingnya pembentukan karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi

juga memiliki kesadaran sosial dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan program-program yang berbasis pada pelestarian lingkungan, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya membekali siswa dengan keterampilan praktis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keberlanjutan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan lingkungan global di masa depan. Hal ini memperkuat peran lembaga pendidikan sebagai agen perubahan yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan (Baskara, 2024).

Namun, implementasi peraturan ini di Ma'had Al-Zaytun tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah kesesuaian antara kurikulum pendidikan nasional dengan pengembangan muatan lokal. Perubahan kebijakan pendidikan secara nasional sering kali memengaruhi ruang untuk integrasi muatan lokal dalam kurikulum, sehingga Ma'had Al-Zaytun perlu melakukan penyesuaian berkelanjutan untuk memastikan konsistensi program (Ma'had Al-Zaytun, 2023). Tantangan lainnya adalah kebutuhan akan tenaga pengajar yang kompeten dalam mengajarkan muatan lokal. Sebagai solusi, Ma'had Al-Zaytun secara aktif mengadakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kearifan lokal dan metode pembelajaran inovatif. Upaya ini tidak hanya mendukung implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan di Ma'had Al-Zaytun (Fatonah, 2023).

Meskipun demikian, pengembangan pendidikan muatan lokal di Ma'had Al-Zaytun dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lain di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan di Ma'had Al-Zaytun menggabungkan berbagai aspek penting dalam pendidikan, seperti pelestarian budaya lokal, penguatan karakter, dan kesadaran lingkungan, yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya dan kearifan lokal, Ma'had Al-Zaytun berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada pengajaran akademik, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai kehidupan yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal. Model ini bisa menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lain di Indonesia untuk mengembangkan kurikulum yang lebih

relevan dengan konteks sosial budaya mereka (Nurjamillah et al., 2023).

Secara keseluruhan, tinjauan terhadap peraturan Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bahwa implementasi pendidikan muatan lokal di lembaga ini sejalan dengan tujuan Perda Nomor 8 Tahun 2015. Melalui kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, penguatan karakter, dan keberlanjutan lingkungan, Ma'had Al-Zaytun memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal sekaligus menjawab tantangan global (Simanullang, 2015).

Menurut Penulis Secara keseluruhan, tinjauan terhadap peraturan Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bahwa implementasi pendidikan muatan lokal di lembaga ini telah berhasil mengintegrasikan berbagai aspek penting yang sejalan dengan tujuan Perda Nomor 8 Tahun 2015. Ma'had Al-Zaytun telah menekankan pada pelestarian budaya lokal, penguatan karakter, serta kesadaran lingkungan yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk siswa menjadi individu yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, lembaga ini mampu menciptakan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat, memberikan siswa keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka, dan menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, kebijakan yang diambil oleh Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfokus pada pendidikan berbasis lokal, tetapi juga membuka wawasan siswa terhadap tantangan global. Dengan menggabungkan pelestarian budaya dengan pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, Ma'had Al-Zaytun memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang tidak hanya berkarakter kuat, tetapi juga siap menghadapi dunia yang semakin terhubung secara global. Hal ini menjadikan Ma'had Al-Zaytun sebagai contoh nyata bagaimana pendidikan muatan lokal dapat berperan dalam membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan lokal sekaligus tantangan global yang terus berkembang.

B. Tinjauan Peraturan Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Siyasa Dusturiyah

Pendidikan muatan lokal merupakan komponen kurikulum yang dirancang untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya, potensi daerah, serta kearifan lokal dalam sistem pendidikan. Muatan lokal bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami identitas budaya mereka, sekaligus menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan sosial dan alam sekitar. Dalam implementasinya, pendidikan ini mencakup berbagai aspek, seperti seni, bahasa daerah, tradisi, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, pendidikan muatan lokal menjadi instrumen strategis untuk membangun karakter peserta didik yang memiliki wawasan global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal (Fahmi, 2017).

Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H mendefinisikan Siyasa Dusturiyah: "Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, hukum tata negara dipandang sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya dengan landasan moral dan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam. Buku ini menguraikan bagaimana konsep-konsep dasar dalam hukum tata negara dapat diintegrasikan dengan ajaran-ajaran Islam untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang adil, baik dalam teori maupun praktek di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, penulis menekankan pentingnya pemahaman akan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Siyasa Dusturiyah sebagai dasar dalam pengembangan hukum dan kebijakan negara." (Lubis, 2019, page 6)

Siyasa Dusturiyah, sebagai cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas pengaturan politik, pemerintahan, dan kebijakan publik, memberikan pandangan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam konteks pendidikan muatan lokal, Siyasa Dusturiyah menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan penguatan potensi daerah sebagai bagian dari amanah kepemimpinan (masalah ammah). Pengintegrasian nilai-nilai lokal ke dalam sistem pendidikan tidak hanya bertujuan membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara

pendidikan spiritual dan sosial. Prinsip keadilan ('adl) dan kebermanfaatn (maslahah) dalam Siyasa Dusturiyah dapat dijadikan pedoman dalam merancang pendidikan muatan lokal agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal Islam (Iqbal, 2016).

Implementasi pendidikan muatan lokal dalam perspektif Siyasa Dusturiyah dapat diwujudkan melalui kebijakan pendidikan yang mendorong pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kurikulum dan pengelolaan pendidikan. Hal ini selaras dengan konsep musyawarah (syura) yang menjadi prinsip penting dalam Siyasa Dusturiyah. Misalnya, lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan tokoh adat, ulama, dan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang relevan bagi peserta didik. Selain itu, penerapan pendidikan muatan lokal yang berlandaskan Siyasa Dusturiyah juga mendorong terciptanya harmoni antara nilai-nilai agama, budaya, dan kebutuhan modern. Dengan demikian, pendidikan muatan lokal tidak hanya menjadi alat pelestarian budaya, tetapi juga (Lubis, 2019).

Siyasa Dusturiyah adalah konsep politik yang berbasis pada konstitusi Islam dan prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan. Konsep ini menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan bijaksana yang berlandaskan pada hukum Islam, serta menghargai hak-hak individu dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, Siyasa Dusturiyah bukan hanya tentang pengajaran teori-teori politik Islam, tetapi juga penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Ma'had Al-Zaytun mengadopsi prinsip-prinsip ini untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan setara, di mana setiap santri diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa diskriminasi (Djazuli, 2015).

Menurut Tafsir Al-Maraghi, Surah Al-Mujadilah (58:11): menegaskan keutamaan iman dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa keimanan menjadi dasar utama yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah, sementara ilmu pengetahuan merupakan pelengkap yang

menguatkan keimanan tersebut. Orang yang berilmu tidak hanya memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga mampu mengaplikasikan ilmu mereka untuk kebaikan umat manusia, sehingga Allah mengangkat derajat mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu (Al-Maraghi, 1974).

Selain itu, Tafsir Al-Maraghi menyoroti bahwa ilmu tanpa iman dapat membawa seseorang pada kesombongan atau penyalahgunaan, sementara iman tanpa ilmu bisa membuat seseorang menjadi lemah dalam menjalankan agamanya. Oleh karena itu, keimanan dan ilmu harus berjalan beriringan. Ayat ini juga menjadi pengingat bahwa Allah Maha Mengetahui amal perbuatan setiap hamba, baik dalam konteks keimanan maupun pemanfaatan ilmu mereka. Oleh karena itu, seseorang yang beriman dan berilmu harus senantiasa memurnikan niat mereka agar apa yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh ridha Allah (Al-Maraghi, 1974).

Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan. Peraturan di Ma'had Al-Zaytun yang mengedepankan prinsip inklusivitas dalam pendidikan muatan lokal sejalan dengan ajaran Siyasah Dusturiyah yang mengutamakan kolaborasi antara individu, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ma'had Al-Zaytun memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan, yang melibatkan bukan hanya siswa, tetapi juga orang tua dan tokoh masyarakat dalam proses pembelajaran. Ini menciptakan hubungan simbiotik yang memperkuat kesadaran sosial dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap pengembangan pendidikan yang relevan dengan konteks lokal (Nurjamillah et al., 2023).

Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren, Ma'had Al-Zaytun memiliki kewajiban moral untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama serta budaya lokal, yang sesuai dengan kaidah Siyasah Dusturiyah. Pendidikan muatan lokal di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga mengedepankan pengajaran tentang nilai-nilai agama, seperti solidaritas, kerjasama, dan keadilan sosial. Ini merupakan bagian integral

dari pendekatan Siyasah Dusturiyah yang mengajarkan bahwa negara atau lembaga pendidikan memiliki peran dalam menumbuhkan masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan memadukan ajaran agama dengan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan di Ma'had Al-Zaytun berupaya mengembangkan karakter siswa agar menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan sesama (Salam et al., 2023).

Pendidikan muatan lokal di Ma'had Al-Zaytun juga mengedepankan nilai keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip Siyasah Dusturiyah, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masa kini dengan masa depan. Dalam hal ini, Ma'had Al-Zaytun mengintegrasikan pendidikan tentang keberlanjutan lingkungan dan pelestarian alam ke dalam kurikulumnya. Program seperti pengelolaan limbah, konservasi air, dan pertanian organik yang diajarkan kepada siswa tidak hanya memberikan keterampilan praktis tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan alam sebagai bagian dari kewajiban moral seorang Muslim. Ini mengingatkan bahwa dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan bijaksana untuk kepentingan umat secara keseluruhan (Kadariusman et al., 2023).

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pendidikan juga harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mampu bersaing di kancah global tanpa kehilangan akar budayanya. Oleh karena itu, Ma'had Al-Zaytun, melalui pengajaran muatan lokalnya, berupaya menanamkan nilai-nilai budaya lokal yang tidak hanya memperkuat identitas siswa, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan yang dapat diterapkan di dunia global. Melalui pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun menciptakan siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga mampu mengaplikasikan kearifan lokal dalam menyelesaikan permasalahan dunia nyata, sekaligus mempertahankan kebudayaan mereka di tengah arus globalisasi.

Di sisi lain, Siyasah Dusturiyah juga mengajarkan bahwa pendidikan harus dapat merespon tantangan zaman. Dalam hal ini, Ma'had Al-Zaytun menanggapi tantangan global dengan mengadaptasi teknologi dan

ilmu pengetahuan modern dalam kurikulumnya, sembari tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang telah ada. Penggunaan teknologi dalam pendidikan muatan lokal memungkinkan Ma'had Al-Zaytun untuk mengembangkan kurikulum yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Ini adalah contoh implementasi prinsip Siyasa Dusturiyah yang mengutamakan kemaslahatan umat dan keadilan dalam pendidikan (Rahim et al., 2023).

Sebagai lembaga yang berbasis pada prinsip-prinsip keagamaan, Ma'had Al-Zaytun juga menerapkan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah dalam mengelola hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Peraturan di Ma'had Al-Zaytun mengedepankan komunikasi yang baik antara pihak manajemen, pengajar, dan masyarakat sekitar dalam setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan. Hal ini memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dan konsultasi dalam pengambilan keputusan (Rahim et al., 2024).

Terakhir, Ma'had Al-Zaytun, dengan mengacu pada perspektif Siyasa Dusturiyah, mengembangkan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga mencakup pembangunan karakter dan akhlak mulia. Pendidikan muatan lokal yang diterapkan di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mengajarkan siswa keterampilan yang berguna di masyarakat, tetapi juga memperkuat aspek moral dan etika siswa sebagai bagian dari persiapan mereka untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun mampu mengimplementasikan pendidikan yang menyeluruh, mencakup baik aspek duniawi maupun ukhrawi, sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah yang mengedepankan kesejahteraan umat, keadilan, dan kemaslahatan bersama (Simanullang, 2015).

Menurut Penulis Siyasa Dusturiyah mengajarkan bahwa kebijakan pendidikan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan muatan lokal yang mencakup pelestarian budaya dan pengembangan sosial-ekonomi. Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip-prinsip ini

dengan melibatkan tokoh agama, seniman, petani, dan masyarakat lokal dalam proses pendidikan. Hal ini memperkaya materi pendidikan dan mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya setempat, sembari mendukung pengembangan sosial-ekonomi komunitas. Selain itu, Ma'had Al-Zaytun juga mengintegrasikan nilai keberlanjutan dalam pendidikan, dengan mengajarkan konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, yang sejalan dengan ajaran Siyasa Dusturiyah mengenai keadilan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan alam.

Ma'had Al-Zaytun, melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan adil, berupaya menghapus kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat, menciptakan kesempatan setara bagi semua siswa, dan memperkuat kohesi sosial. Dengan mengadaptasi teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam kurikulumnya, Ma'had Al-Zaytun juga menanggapi tantangan zaman dan mempersiapkan siswa untuk bersaing di kancah global, sembari mempertahankan nilai-nilai lokal. Pendidikan yang diterapkan di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa, sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah yang menekankan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tinjauan Peraturan Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Pengembangan pendidikan muatan lokal di Ma'had Al-Zaytun selaras dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Di Ma'had Al-Zaytun, muatan lokal dikembangkan melalui integrasi seni, bahasa daerah, dan keterampilan berbasis kebutuhan lokal seperti pertanian organik dan pengelolaan lingkungan. Hal ini mencerminkan implementasi prinsip pelestarian nilai budaya lokal sesuai Perda tersebut. Bukti keberhasilannya terlihat dari program-program pendidikan yang tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga masyarakat lokal, seperti pelatihan berbasis kearifan lokal dan kolaborasi dengan tokoh adat setempat. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun memenuhi

mandat Peraturan Daerah dengan mengutamakan pendidikan berbasis karakter dan potensi lokal yang relevan.

2. Tinjauan Peraturan Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengembangan Pendidikan Muatan Lokal Perspektif Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 *Siyasah Dusturiyah* yaitu pendidikan muatan lokal di Ma'had Al-Zaytun merepresentasikan upaya untuk mewujudkan *masalah ammah* (kesejahteraan umum) melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. *Siyasah Dusturiyah* menekankan pentingnya musyawarah (syura) dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Ma'had Al-Zaytun telah mengimplementasikan prinsip ini dengan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, seniman, dan ulama, dalam merancang kurikulum muatan lokal. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan pendidikan di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan, sesuai dengan ajaran *Siyasah Dusturiyah*. Contoh konkret dari pendekatan ini adalah integrasi pendidikan berbasis pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, yang tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga mencerminkan tanggung jawab global.

B. Saran

1. Pendekatan Kualitatif dengan Wawancara Mendalam: Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pengelola lembaga pendidikan, siswa, tokoh masyarakat, dan orang tua. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan, keberhasilan, serta faktor-faktor pendukung dalam implementasi pendidikan muatan lokal yang berbasis pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan *Siyasah Dusturiyah*.
2. Evaluasi Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan: Peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi kurikulum dan kebijakan pendidikan di Ma'had Al-Zaytun, dengan fokus pada efektivitas pengajaran muatan lokal dalam mengintegrasikan nilai-nilai dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini bisa menggali bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kualitas pendidikan dan pengembangan karakter siswa.
3. Studi Kasus Terhadap Dampak Sosial-Ekonomi: Penelitian lebih lanjut dapat meneliti dampak sosial dan ekonomi dari penerapan pendidikan muatan lokal di Ma'had Al-Zaytun terhadap masyarakat sekitar. Fokus penelitian dapat mencakup pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan budaya, dan peningkatan kualitas hidup warga melalui pendidikan berbasis kearifan lokal yang diajarkan di lembaga tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Acim, S. A., & Sumardi, L. (2023). Systematic, substantive and functional comparison between the holy Qur'an and Pancasila. *Hervormde Theologische Studies*, 79(2). doi:<https://www.proquest.com/results/4B706320F58E4F0FPQ/1?accountid=215586>
- Ahmad Iqbal, M. F., Wan Mohd Yusof, W. C., Ismail, A. F., Moktar, M. S., Zulkifli, A. A., & Mohd, Z. (2022). Konsep kewarganegaraan menurut piagam madinah: Suatu sorotan awal. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 23(2), 207-220. <https://www.proquest.com/results/CA2D8B766F1A49C2PQ/1?accountid=215586>
- Al-Maraghi, A. M. (1974). Tafsir Al-Maraghi. *Terjemahkan Oleh: Bahrin Abu Bakar Lc, Drs. Hery NoerAly.*
- Asror, M. (2022). Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Mengembangkan Sikap Toleransi Santri Di Pondok Pesantren. *Mindset: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1, 42-53. <https://doi.org/10.58561/mindset.v1i1.26>
- Atmojo, S. E., Lukitoaji, B. D., & Anggriani, M. D. (2024). THE IMPACT OF STEM INTEGRATION IN PANCASILA CHARACTERORIENTED LEARNING ON THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF INDONESIAN ELEMENTARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES. *Revista De Gestão Social e Ambiental*, 18(7), 1-2. doi:<https://www.proquest.com/results/4B706320F58E4F0FPQ/1?accountid=215586>
- Baskara, A. (2024). *COMPARISON OF POLITICAL DYNASTY IN INDONESIA (Proquest)*. 1-8.
- Djazuli. (2015). *Implementasi Kemaslahatan*

Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.
Jakarta : Kencana.

- Fahmi, M. (2017). PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *PETITA Jurnal Kajian Hukum Dan Syariah*, 2.
- Felecia, F., & Halim, S. (2024). Exploring the influence of gamified digital learning on student engagement and learning: A case study on using interactive comics to study pancasila. *The International Journal of Technologies in Learning*, 31(2), 143. doi: <https://www.proquest.com/results/4B706320F58E4F0FPQ/1?accountid=215586>
- Fenton, A. J. (2024). The pancasila ideological direction bill (RUU-HIP): A missed opportunity? *Politics and Governance*, 12 doi:htt. doi:<https://www.proquest.com/results/4B706320F58E4F0FPQ/1?accountid=215586>
- Fidyansyah, T., & Rohmah, S. N. (2021). Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 555-572. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254>
- Hakiki, Z. (2022). *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Pembentukan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah Perspektif Siyāsah* <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22683/>
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam.* Prenanda Media group.
- Kadarusman, A., Aziz Firdaus, I., & Indra Setiabudi, D. (2023). Eksistensi Kiprah Al Zaytun dalam Mengembangkan Toleransi dan Perdamaian Berlandaskan Pancasila Secara Universal. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(1), 1. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Ma'had Al-Zaytun. (2023). *Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas dan Manusiawi.* Al-Zaytun. <https://www.al-zaytun.sch.id/>
- Malik, A., Rahim, A., & Taufiqurachman, T. (2023). Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3599-3610. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003>
- Mohd, R. M., & Basri, I. (2018). Konsep pelantikan pemimpin dari sudut perspektif fiqh siyasah: Analisis terhadap teori-teori pemikiran politik islam. *Urnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 17(1), 17-26. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/konsep-pelantikan-pemimpin-dari-sudut-perspektif/docview/2437120055/se-2>
- Nurjamillah, I., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan Fiqih Siyasah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(4), 1191-1208. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34131>
- Rahim, A., Jabar, M. A., Zahira, T., Nazhif, N., & Widodo, S. (2024). Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Pelajar Ma'had Al-Zaytun. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2878-2883. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4107>
- Rahmatulloh, Rasminto, Maulana, C., & Khausar. (2021). Implementasi Kebijakan Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Kesenian Betawi pada lingkungan Pendidikan Formal Di Provinsi DKI Jakarta. *Genta Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(2), 49-62.
- Salam, N. D., Amandla, K. V., Hamidah, S., & Setiabudi, D. I. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA SANTRI MAHAD AL-ZAYTUN DI ERA GLOBALISASI Institut Agama Islam AL-Zaytun Indonesia Civilia: Pendahuluan Pancasila pada

- hakekatnya ialah dasar negara Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan kebuday. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 186-196.
- Setiawan, R. A. (2023). Impact of islamic jurisprudential on traditional financial customs and legal integration in indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(2), 196. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/impact-islamic-jurisprudential-on-traditional/docview/2907493994/se-2>
- Simanullang, D. C. R. (2015). *Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Pustaka Tokoh Indonesia.
- Sobirin, S., & Santoso, B. (2023). Implementasi Orhiba Di Mahad Al-Zaytun Pada Masa Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(3), 759-772. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32500>
- Somad, A., & Suwandana, E. (2022). Pentingnya Penambahan Muatan Lokal Pembelajaran Sejarah Pada Peraturan Gubernur Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.137>